

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah usaha skala mikro dan kecil umumnya dikelola melalui cara sederhana sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Selain tidak memerlukan modal yang besar, aktivitas usaha mikro kecil tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari karena merupakan kegiatan ekonomi yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Saat ini fenomena usaha mikro dan kecil di Indonesia menunjukkan bahwa usaha mikro secara jumlah lebih banyak dibandingkan usaha kecil. Karakteristik Usaha mikro salah satunya adalah tempat usahanya berpindah-pindah, dari satu lokasi ke lokasi yang lain bahkan bisa lintas wilayah. Tipe barang/komoditi juga dimungkinkan tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah, ada kalanya terjadi perubahan tipe aktivitas menyesuaikan keadaan. Akibat dari perubahan-perubahan tersebut, umumnya usaha mikro dan kecil di Indonesia menjalankan usaha secara komersial dalam waktu yang relatif tidak lama.(BPS, 2019)

Peraturan pemerintah No 7 tahun 2021 menyatakan bahwa usaha mikro dan kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Usaha mikro dan kecil berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu buktinya Kementerian Koperasi dan UMKM mengungkapkan bahwa kontribusi usaha mikro dan kecil terhadap total jumlah unit usaha di Indonesia rata-rata mencapai 99,9 persen (98,74 persen usaha mikro dan 1,15 persen usaha kecil), sedangkan sisanya adalah perusahaan menengah dan besar. Demikian juga dalam penyerapan tenaga kerja rata-rata sekitar 88,70 persen dari usaha mikro, 4,95 persen dari usaha kecil, sedangkan 6,34 persen sisanya diserap oleh usaha menengah dan besar selama periode 2015-2019 (lihat tabel 1.1).

Tabel 1.1. Persentase Unit Usaha di Indonesia Periode 2015-2019

Tahun	Skala Unit Usaha (%)			
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar
Persentase Jumlah Unit Usaha				
2015	98,74	1,15	0,10	0,01
2016	98,71	1,19	0,09	0,01
2017	98,70	1,20	0,09	0,01
2018	98,68	1,22	0,09	0,01
2019	99,67	1,23	0,10	0,01
Rata-rata	98,70	1,20	0,09	0,01
Persentase Jumlah Tenaga Kerja				
2015	86,96	5,73	4,01	3,29
2016	89,31	4,65	3,09	2,96
2017	89,17	4,74	3,11	2,98
2018	89,04	4,84	3,13	3,00
2019	89,04	4,81	3,07	3,08
Rata-rata	88,70	4,95	3,28	3,06
Persentase Kontribusi Terhadap PDB Harga Berlaku				
2015	37,88	9,71	13,82	38,59
2016	36,65	9,63	13,57	40,16
2017	36,82	9,61	13,57	40,00
2018	37,77	9,60	13,70	38,93
2019	37,35	9,53	13,63	39,49
Rata-rata	37,29	9,62	13,66	39,43
Persentase Kontribusi Terhadap PDB Harga Konstan*				
2015	29,62	13,80	14,34	42,25
2016	30,25	12,42	14,50	42,83
2017	30,06	12,54	14,49	42,92
2018	29,29	13,56	14,38	42,76
2019	30,07	12,49	14,59	42,86
Rata-rata	29,86	12,96	14,46	42,72

Keterangan : * PDB atas dasar harga konstan (Tahun Dasar 2010)

Sumber : Kemenkopukm, 2020

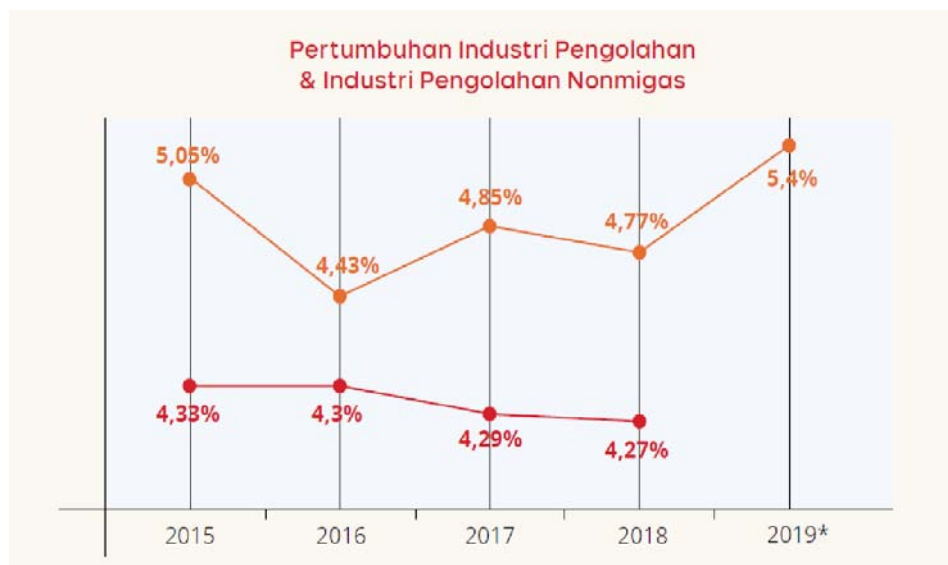
Usaha mikro dan kecil saat ini memberikan rata-rata kontribusi sebesar 29,86 persen untuk usaha mikro dan 12,96 persen untuk usaha kecil dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) harga konstan selama periode 2015-2019 (lihat tabel 1.1.), walaupun secara nilai masih dibawah industri besar. Namun keberadaan usaha mikro dan kecil tetap penting untuk diperhatikan agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi dalam rangka penyerapan tenaga kerja, penanggulangan pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Tentunya dukungan pemerintah terhadap usaha mikro dan kecil sangat dibutuhkan khususnya pada usaha mikro, karena usaha mikro saat ini masih memiliki peran penting bagi penciptaan lapangan kerja (Rubin dkk, 2016).

Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup besar dalam beberapa dekade mendatang. Sehingga perlu strategi dalam mewujudkan potensi tersebut, salah satunya melakukan identifikasi sektor industri mikro, kecil dan menengah sebagai kunci untuk meningkatkan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Rubin dkk, 2016).

Usaha mikro dan kecil terdiri dari tujuh belas jenis sektor usaha, salah satunya adalah industri pengolahan. yaitu suatu kegiatan ekonomi yang merubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi atau setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi dengan mesin ataupun dengan tangan(BPS, 2020).

Industri pengolahan masih menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2014-2019. Pertumbuhan industri

non migas selama 5 tahun tersebut rata-rata selalu di atas 4 persen dan diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapai 5 persen.(lihat gambar 1.1.).(Kemenperin, 2020).



Sumber : Kemenperin, 2020

Keterangan :
 • Industri pengolahan non migas
 • Industri pengolahan

Gambar 1.1. Pertumbuhan Industri Pengolahan & Industri Pengolahan Non Migas

Salah satu perhatian pemerintah pada industri pengolahan melalui visi pencanangan pembangunan nasional berupa pengembangan industri pengolahan yang memiliki daya saing dengan struktur industri yang kuat dengan dasar sumber daya alam, teknologi dan inovasi serta berkeadilan (Kemenperin, 2015). Demi tercapainya tujuan tersebut, pemerintah senantiasa berusaha menumbuhkan sebaran industri pengolahan untuk bergerak ke seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan industri pengolahan diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat antara industri mikro, kecil, menengah, dan besar dalam menjalankan perannya masing-

masing, seperti pengembangan sentra industri pengolahan skala mikro dan kecil guna peningkatan kontribusi dalam perekonomian nasional (BPS, 2020).

Berdasarkan data BPS, industri pengolahan non migas skala mikro dan kecil selama periode Tahun 2015-2019, memiliki rata-rata jumlah industri sebesar 4,23 juta industri dengan rata-rata persentase terhadap seluruh usaha mikro dan kecil di Indonesia sebesar 6,75 persen (lihat tabel 1.2.)

Tabel 1.2. Jumlah Usaha dan Persentase Industri Pengolahan Skala Mikro dan Kecil Non Migas Terhadap Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia Periode 2015-2019

Tahun	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Industri Pengolahan Non Migas Skala Mikro dan Kecil (persen)
2015	3.668.873	59.203.509	6,20
2016	4.384.459	61.594.625	7,12
2017	4.464.688	62.863.990	7,10
2018	4.264.047	64.133.354	6,65
2019	4.380.176	65.400.031	6,70
Rata-rata	4.232.448	62.639.102	6,75

Sumber : BPS, 2020, diolah

Sejauh ini kegiatan industri mikro dan kecil (IMK) baik sektor tradisional maupun modern mampu menyerap banyak tenaga kerja. Rata-rata penyerapan tenaga kerja oleh IMK di Indonesia sekitar 63 persen, sementara 37 persen sisanya diserap oleh perusahaan menengah dan besar selama periode 2010-2015 (Setiawan dkk., 2016). Hal ini didukung dengan data pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja oleh IMK sebesar 9,58 juta orang dengan 94,65 persen adalah tenaga kerja produktif yaitu tenaga kerja dengan usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun (BPS, 2020).

Setiawan dkk (2016) menyatakan bahwa terlepas dari kontribusinya yang signifikan terhadap lapangan kerja, kontribusi output rata-rata IMK masih sekitar 10 persen terhadap total output industri di Indonesia selama periode 2010-2015. IMK masih belum memiliki kontribusi output yang signifikan bagi industri Indonesia dibandingkan dengan perusahaan menengah dan besar yang rata-rata berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total output industri pengolahan selama periode 2010-2015. Output suatu produksi tentunya tidak akan terlepas dari produktivitas dan tingkat efisiensi. Hal ini merupakan cerminan dari kemampuan kinerja ekonomi suatu industri, yaitu rasio antara output terhadap input. Permasalahan yang terjadi pada IMK terkait dengan efisiensi internal yang menjadi sumber rendahnya kontribusi output dari IMK terhadap total output industri di Indonesia.

IMK di Indonesia umumnya memiliki *Technical Efficiency* (TE) yang masih rendah. TE sendiri merupakan suatu cara perusahaan mengubah input menjadi output. Terkait rendahnya TE pada IMK, beberapa penelitian sebelumnya seperti Hill dan Kalijaran (1993) menemukan bahwa IMK Garmen di Indonesia memiliki rata-rata TE yang rendah, sekitar 80 persen IMK memiliki TE kurang dari 65 persen. Demikian pula Setiawan dkk. (2016) menemukan bahwa rata-rata TE pada IMK di wilayah Bandung berada pada interval 35 persen sampai dengan 46 persen. Rendahnya TE pada IMK dapat disebabkan oleh kurangnya pembiayaan, kurangnya inovasi, kurangnya kemampuan manajemen dan kurangnya akses ke teknologi (Wan, 2003; Saleh dan Ndubisi, 2006; Setiawan dkk., 2016).

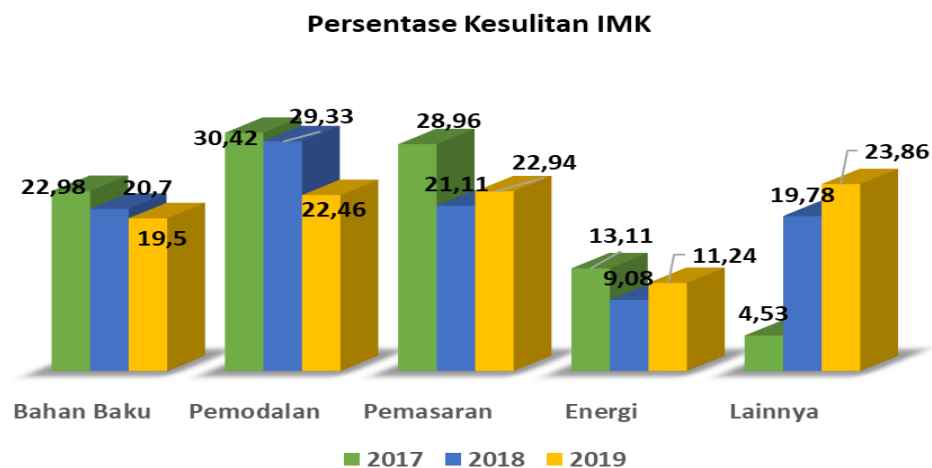
Permasalahan TE yang dihadapi oleh IMK mengakibatkan IMK cenderung memiliki nilai produksi dibawah *production frontier*, dengan kata lain limit dari output maksimal yang bisa dicapai oleh IMK tentunya melalui input dan teknologi yang ada. Kondisi efisien secara teknis kemungkinan tidak dapat dipenuhi, padahal sesungguhnya hal ini merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas produksi (Samad dan Patwary, 2002). Selain masalah terkait TE, beberapa masalah lain seperti kurangnya modal, akses pemasaran terbatas, kompetisi dalam bisnis yang ketat, bahan baku susah diperoleh, keahlian sumber daya manusia yang masih kurang, keterampilan manajerial yang masih harus ditingkatkan, kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen, dan kurangnya teknologi (Sisilia dkk, 2015), menjadi tantangan tersendiri bagi IMK dalam menjalankan usahanya.

Beberapa permasalahan industri mikro dan kecil sudah banyak ditelaah oleh beberapa literatur meliputi manajemen produksi, pemasaran, kurangnya jangkauan pada sistem pendukung lainnya dan akses finansial yang rendah (Berry dan Mazumdar, 1991; Urata, 2000). Beberapa peneliti menyampaikan problem kemudahan mendapatkan modal, kebijakan terkait formalitas, kemudahan memperoleh bahan baku, kesulitan informasi, pemasaran, distribusi, transportasi, serta tenaga kerja (seperti upah dan kualitas) (Nichter dan Goldmark, 2009; Tambunan, 2008; Essien, 2007; Alvarez dan Crespi, 2003; Malecki dan Tootle, 1996).

Selaras dengan fenomena yang terjadi, BPS juga menginformasikan perihal yang sama, berdasarkan survei pada industri pengolahan skala mikro dan kecil di

Indonesia tahun 2019, diketahui IMK mengalami kesulitan pemasaran sebesar 22,94 persen, kesulitan permodalan sebesar 22,46 persen, dan kesulitan bahan baku sebesar 19,50 persen. Dua diantaranya, yaitu ketersediaan bahan baku dan permodalan merupakan variabel input yang berpengaruh terhadap produksi IMK dan TE.

Data hasil survei industri pengolahan skala mikro dan kecil periode Tahun 2017-2019 dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa rata-rata lebih dari 90 persen IMK mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Pada Gambar 1.2. terlihat permodalan dan pemasaran menjadi masalah yang dominan selama periode 2017-2019, sedangkan untuk kesulitan lainnya (infrastruktur, kompetitor, tenaga kerja, cuaca, dan lainnya) sepanjang tahun mengalami peningkatan.



Sumber : BPS, 2017-2019, diolah

Gambar 1.2. Persentase Jenis Kesulitan yang dialami IMK Periode 2017-2019

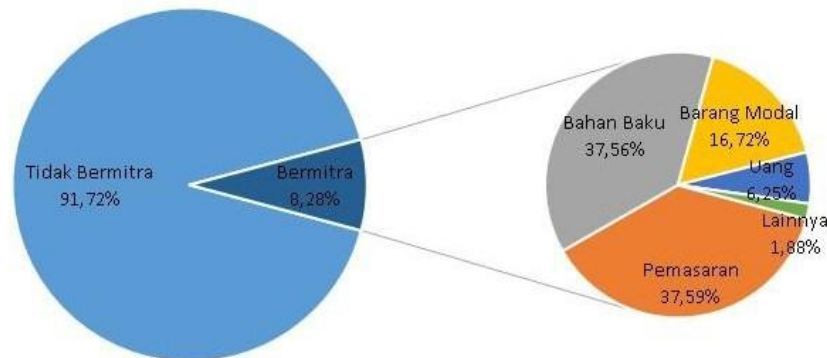
Kemitraan menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh IMK tersebut. Pengertian kemitraan sendiri menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah Pasal 1 ayat 13 adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku IMK dengan industri besar. Filosofi saling membantu antara IMK dengan industri besar bertujuan untuk menghindari adanya monopoli dalam usaha. Selain itu IMK dapat memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian IMK akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pola kemitraan antara industri besar dengan IMK yang diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2008 serta diimplementasikan dengan dasar PP No 17 Tahun 2013, secara nyata belum berjalan sesuai harapan. Hal ini dibuktikan dengan data yang menyatakan bahwa sebesar 92 persen IMK hingga tahun 2019 belum menjalankan kemitraan dalam perjalanan usahanya dan hanya sebesar 8 persen usaha yang menjalin kemitraan. Besarnya jumlah IMK yang belum menjalin kemitraan disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan akses dengan industri besar, informasi dan pengetahuan terbatas tentang kemitraan, persyaratan yang sulit dipahami oleh industri mikro dan kecil (Diana, 2019)

Berdasarkan pengalaman IMK yang menjalin kemitraan, sebesar 93,93 persen, mendapatkan keuntungan saat bermitra dengan pihak ketiga, dengan kata lain hanya 6,07 persen yang berpendapat sebaliknya (belum menguntungkan). Ada

beberapa hal yang perlu dijaga agar kegiatan kemitraan menjadi lebih maksimal, diantaranya jaminan pembayaran tepat waktu, jaminan penyerapan hasil produksi, proporsi bagi hasil, dan jaminan kualitas bahan baku.(BPS, 2020).

Kemitraan yang pernah dilakukan berupa pemasaran (37,59 persen), pengadaan bahan baku (37,56 persen), dan barang modal (16,72 persen), modal dalam bentuk uang (6,25 persen), lain-lain (1,88 persen) secara detail bisa dilihat pada Gambar 1.3 berikut ini:



Sumber : BPS, 2020

Gambar 1.3. Persentase IMK yang menjalin Kemitraan Tahun 2019

Pihak Swasta merupakan instansi/lembaga yang memiliki peran besar dalam kegiatan kemitraan dengan IMK pada tahun 2019 yaitu sebesar 36,25 persen. Sedangkan peran pemerintah dalam hal ini adalah BUMN/BUMD hanya sebesar 3,23 persen saja. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan program kemitraan dengan IMK sehingga dapat memecahkan masalah serta kesulitan yang dihadapi oleh usaha IMK. Instansi/lembaga yang

berperan dalam kegiatan kemitraan dengan IMK adalah perbankan dan LSM. Walaupun jumlah kemitraannya terbilang sedikit yaitu sebesar 2,49 persen dan 1,28 persen (BPS., 2020).

Pola kemitraan terbanyak yang dilakukan oleh IMK adalah perdagangan umum yaitu sebesar 45,87 persen, dengan kata lain usaha yang lebih besar membantu IMK dalam bentuk kerjasama pemasaran produk, penyediaan lokasi usaha, penerimaan pasokan dari IMK sebagai mitra usaha untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh industri besar sesuai dengan persyaratan dan kualitas produk yang telah disepakati. Pola kemitraan terbanyak kedua adalah kerjasama operasional sebesar 18,22 persen, merupakan kerjasama dalam menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaannya selesai. Berikutnya pola kemitraan bagi hasil sebesar 8,43 persen IMK berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh industri besar dengan membagi hasil keuntungan usahanya. Sementara pola kemitraan inti-plasma, subkontrak, dan usaha patungan juga dijalankan oleh usaha IMK tetapi jauh lebih sedikit dibanding tiga pola kemitraan sebelumnya, berturut-turut sebesar 7,42 persen, 5,40 persen, dan 1,85 persen (BPS., 2020)

Temuan hasil survei BPS mengindikasikan bahwa dalam pengembangan usaha IMK masih kurang optimal terutama dalam menjalin kemitraan. Tentunya peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, sangat perlu ditingkatkan dalam melakukan pembinaan terhadap IMK terkait program kemitraan yang dipercaya memberikan dampak positif terhadap manajemen pengelolaan serta peningkatan

produktivitas IMK berupa transfer teknologi dan peningkatan efisiensi IMK (ASEAN, 2016). Aktivitas kemitraan pada industri mikro (jumlah tenaga kerja 1-4 orang) dan industri kecil (jumlah tenaga kerja 5-19 orang), sangat relevan untuk diteliti dan ditelaah khususnya terkait strategi industri (Tambunan, 2008) guna mengetahui keterbatasan dan tantangan usaha yang dihadapi industri. Terkait strategi perusahaan, kemitraan merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kendala yang dihadapi, yaitu melalui konsolidasi dengan tujuan memberikan manfaat bagi IMK. Konsolidasi diharapkan mampu meningkatkan produksi, pemasaran produk maupun keterampilan dan pengetahuan dalam peningkatan nilai tawar dan proses produksi. Harapannya konsolidasi yang dikerjakan mampu memberikan kesempatan kepada IMK dalam kegiatan kemitraan serta menjadi bagian dari organisasi yang lebih besar dan mendapatkan kemanfaatan seperti halnya yang dialami oleh industri besar (Loveman dan Sengenberger, 1991).

Industri mikro dan kecil diharapkan menjalankan program kemitraan dengan harapan bisa mendapatkan langkah yang fleksibel serta mudah dalam memperoleh sumber daya, tambahan keterampilan tentunya yang dimiliki oleh perusahaan lain melalui pengaturan, pertukaran, penggunaan, dan pengembangan teknologi (Genç dan Iyigün, 2011). Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, program kemitraan bisa menjadi alternatif untuk meminimalisasi permasalahan yang berpotensi mengganggu proses produksi pada industri mikro dan kecil. Sehingga penelitian ini akan menganalisis pengaruh program kemitraan terhadap produktivitas IMK di Indonesia.

1.2. Kesenjangan Penelitian

Sejauh ini penelitian terkait produktivitas dan TE pada industri mikro dan kecil di Indonesia, seperti Hill dan Kalijaran (1993), Setiawan dkk, (2016) dan Setiawan dan Tisnawati (2018) melibatkan variabel skala usaha, usia usaha, tingkat pendidikan pengelola usaha, struktur tenaga kerja, jenis kelamin pemilik usaha dan struktur permodalan. Penelitian ini mencoba mengisi ketidakersediaan variabel kemitraan sebagai salah satu variabel yang diduga mempengaruhi efisiensi dan produktivitas pada industri.

Penelitian mengenai dampak kemitraan terhadap produktivitas IMK di Indonesia, sebagian besar berupa penelitian yang menggunakan metode kualitatif seperti Harker dan Akkeren (2002), Indarti dan Langenberg (2004), Genç dan Iyigün (2011), Hamdani dan Wirawan (2012), Giang dkk. (2019). Sedangkan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif seperti Nirwesti dan Nachrowi (2018), Franco dan Haase (2020), metode yang digunakan adalah pengelompokan faktor dan mencari hubungan korelasional saja belum menyentuh tipe peningkatan efisiensi. Namun demikian, sudah ada penelitian yang menyatakan kegiatan kemitraan (*interfirm cooperation*) adalah salah satu aktivitas yang membuat sebuah industri/perusahaan memiliki TE yang tinggi (Burki dan Terrell, 1998). Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini berupaya mengembangkan model ekonomi terkait manfaat program kemitraan terhadap peningkatan produktivitas IMK di Indonesia yang diturunkan dari model *Stochastic Production Frontier* (SPF). Pengukuran produktivitas IMK tidak hanya dilihat dari variabel input saja

namun juga melibatkan variabel kemitraan sebagai unsur inefisiensi dalam model serta melakukan analisis pengaruh program kemitraan terhadap kinerja produktivitas IMK melalui komponen *Total Factor Productivity* (TFP) dalam menjelaskan pertumbuhan output dari IMK.

Oleh sebab itu, studi komprehensif tentang dampak kemitraan terhadap produktivitas IMK di Indonesia yang mencakup produktivitas maupun peningkatan efisiensi perlu dan penting untuk dilakukan dengan mengadaptasi metode yang telah ada. Spesifikasi empiris diperlukan guna melihat pola hubungan antara kemitraan dengan produktivitas dan TE. Spesifikasi empiris diperoleh dari beberapa sumber referensi sesuai dengan kondisi data IMK yang tersedia di Indonesia.

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat ditemukan beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan pada penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana elastisitas output industri mikro dan kecil dengan mempertimbangkan masing-masing input dalam proses produksi ?
2. Bagaimana tingkat TE industri mikro dan kecil dengan adanya program kemitraan?
3. Apakah kemitraan berpengaruh terhadap TE industri mikro dan kecil ?
4. Bagaimana pertumbuhan total faktor produktivitas industri mikro dan kecil?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan berdasarkan rumusan permasalahan, sebagai berikut:

1. Menganalisis elastisitas output industri mikro dan kecil dengan mempertimbangkan masing-masing input dalam proses produksi;
2. Menganalisis tingkat TE industri mikro dan kecil dengan melibatkan program kemitraan;
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kemitraan, terhadap TE industri mikro dan kecil;
4. Menganalisis pertumbuhan total faktor produktivitas industri mikro dan kecil dengan melibatkan program kemitraan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menganalisis dampak program kemitraan terhadap produktivitas industri mikro dan industri kecil di Indonesia dengan ruang lingkup kajian, data, dan metode dengan melibatkan hampir semua sektor industri pengolahan. Sehingga diharapkan penelitian ini memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara implikasi di bidang ekonomi yang bisa menjadi pijakan dalam mengelola kegiatan ekonomi industri pengolahan skala mikro dan kecil sebagai berikut :

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu:
 - a. membuktikan keberadaan dampak program kemitraan terhadap produktivitas IMK di Indonesia;
 - b. membuat estimasi nilai TE IMK dengan melibatkan variabel kemitraan;
 - c. memberikan kontribusi teoritis-modeling berupa pengembangan metode estimasi yang dipergunakan untuk mengevaluasi dampak program kemitraan terhadap produktivitas IMK;
 - d. menyediakan landasan teoritis dan metodologis terhadap variabel kemitraan dalam model yang bersifat simultan, dengan harapan bisa menjadi referensi untuk penelitian-penelitian bidang ekonomi. Walaupun dalam penelitian ini hanya diterapkan pada sektor industri pengolahan, namun konsep kemitraan pada penelitian ini bisa diterapkan pada berbagai sektor lainnya.
2. Memberikan informasi terkait manfaat jangka panjang keberadaan program kemitraan yang telah dilakukan di Indonesia sesuai amanah Undang-Undang yang menyatakan bahwa industri besar di Indonesia harus mampu menjalin kemitraan dengan IMK guna peningkatan produktivitas IMK dan mengangkat IMK dari sisi kinerja dan produktivitas.
3. Membantu para penentu kebijakan dalam menentukan program kemitraan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia sesuai bidang kualifikasi atau sektor IMK untuk mendapatkan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas usahanya.